



LAPORAN DELEGASI DPR RI

"SECOND PARLIAMENTARY CONFERENCE
ON INTERFAITH DIALOGUE"

Roma, Italia 19-21 Juni 2025





LAPORAN PARTISIPASI PERSIDANGAN INTERNASIONAL BKSAP DPR RI

Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Strengthening Trust and Embracing Hope for Our Common Future

**A parliamentary event organized by the Inter-Parliamentary Union and the Italian
Parliament with the support of Religions for Peace**

**THE ITALIAN PARLIAMENT, ROME
19-21 JUNI 2025**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) hadir dan berpartisipasi aktif dalam *the Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* yang diselenggarakan pada 19-21 Juni 2025 di Roma, Italia. Acara ini diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parlemen Italia, bekerja sama dengan Religions for Peace.

Konferensi ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan dan merangkul harapan untuk masa depan bersama. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari konferensi pertama yang diadakan pada Juni 2023 di Marrakesh, Maroko, yang menghasilkan Marrakesh Communiqué,

Sebuah deklarasi yang menekankan pentingnya dialog lintas agama dalam mempromosikan inklusivitas, perdamaian, dan supremasi hukum.

Konferensi ini mempertemukan para pembicara dan anggota parlemen, serta perwakilan dari berbagai agama, kepercayaan, pemerintahan, badan PBB, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Melalui berbagai sesi tematik, peserta membangun rekomendasi dari Marrakesh Communiqué dan

mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk mempromosikan perdamaian, inklusi, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia bagi semua orang.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi BKSAP DPR RI ke *the Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* pada 19-21 Juni 2025 didasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Dewan Pimpinan BKSAP DPR RI dengan Surat Tugas Nomor Nomor: 14/KU.05.01/KSOI/ST/6/2025

C. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi BKSAP DPR RI, terdiri dari :

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ms. Irine Yusiana Roba Putri	PDIP	KETUA DELEGASI (WAKIL KETUA BKSAP DPR RI)
2.	Mr. Bramantyo Suwondo	P-Gerindra	ANGGOTA (WAKIL KETUA BKSAP DPR RI)
3.	Mr. Gilang Dhielafararez	PDIP	ANGGOTA
4.	Mr. Abraham Sridjaja	PDIP	ANGGOTA

Selama mengikuti persidangan, Delegasi BKSAP didampingi oleh diplomat KBRI Roma, satu orang sekretaris dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, dan satu orang Tenaga Ahli BKSAP DPR RI.

D. Maksud Dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan pengiriman delegasi BKSAP DPR RI ke *the Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan komitmen Indonesia dalam diplomasi parlementer yang mendukung dialog lintas agama sebagai sarana memperkuat kepercayaan dan harapan bersama.
2. Memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, inklusivitas, dan hak asasi manusia, serta berperan aktif dalam mendorong koeksistensi damai antarumat beragama.
3. DPR RI, sebagai wakil rakyat, memiliki peran strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai dialog lintas agama ke dalam kebijakan publik dan legislasi nasional.

- 
4. Kehadiran DPR RI membawa pengalaman Indonesia dalam mengelola pluralisme secara konstruktif, serta menunjukkan bahwa demokrasi dan keberagaman bisa berjalan beriringan.
 5. DPR RI hadir untuk mendukung *interfaith dialogue* sebagai alat penting dalam mencegah konflik, membangun kepercayaan antar komunitas, dan memperkuat kohesi sosial. Dialog ini dianggap sebagai penangkal polarisasi dan ekstremisme, serta sebagai sarana untuk membangun harapan bersama di tengah krisis global.

E. Misi Delegasi

Misi Delegasi DPR-RI dalam pertemuan *the Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* adalah :

1. DPR RI hadir untuk memperkuat peran parlemen dalam membangun dialog antaragama sebagai sarana mencegah konflik, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai.
2. Sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya, Indonesia melalui DPR RI membawa misi untuk menunjukkan praktik toleransi dan koeksistensi damai.
3. Menyampaikan pengalaman DPR RI dalam melindungi hak beragama dan kebebasan berkeyakinan, menegaskan bahwa pluralisme adalah kekuatan, bukan ancaman.
4. DPR RI mempunyai misi membangun kemitraan strategis antara parlemen dan pemimpin agama untuk mencegah penyalahgunaan agama dalam politik, melawan ujaran kebencian dan ekstremisme serta mendorong kebijakan publik yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan
5. Sebagai wakil rakyat, DPR RI membawa misi untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, mendorong akuntabilitas dan solidaritas global serta menjadi bagian dari solusi atas krisis global melalui pendekatan lintas agama dan budaya.

F. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadiri *the Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue*. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi ke Roma, delegasi mengadakan rapat delegasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2025. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri.



II. ISI LAPORAN

A. Agenda Sidang

No.	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Rabu, 18 Juni 2025			
1.	07.25	Kedatangan Delegasi (Group 1)	Rome Fiumicino International Airport
2.	09.45	Kedatangan Delegasi (Group 2)	Rome Fiumicino International Airport
Kamis, 19 Juni 2025			
1.	09.00-12.00	Registrasi Delegasi	Chamber of Deputies, Piazza di Monte Citorio
2.	09.30-11.00	Thematic working session 1 Promoting peaceful coexistence	Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari
3.	11:30 – 13:00	Thematic working session 2 Lessons from the Marrakesh Declaration (2016): Upholding the rights of religious minorities	Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari
4.	14:30 – 15:30	Opening ceremony Opening remarks by the Speakers of the Host Parliament, the IPU President and special guests	Plenary Hall of the Chamber of Deputies
5.	16:00 – 18:00	Lessons from the Marrakesh Declaration (2016): Upholding the rights of religious minorities	Plenary Hall of the Chamber of Deputies
6.	19:00	Reception hosted by the President of the Italian Senate	Senate of the Republic
Jumat, 20 Juni 2025			
1.	09:00 – 12:30	General Debate Parliamentarians in dialogue with religion and belief: Strengthening trust and embracing hope for our common future	Plenary Hall of the Chamber of Deputies
2.	09:30 – 10:45	Panel 1 Advancing inclusive societies, ensuring freedom of religion or belief	Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari

3.	09:30 – 10:45	Panel 2 Promoting ethical leadership at all levels, investing in education for peace	Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari
4.	12:30 – 14:00	Lunch	Chamber of Deputies
5.	14:00 – 17:00	Continuation and closing of the General Debate	Plenary Hall of the Chamber of Deputies
6.	14:00 – 15:30	Panel 3 Interfaith dialogue for the inclusion of women in public life	Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari
7.	16:00 – 17:15	Panel 4 Fostering solidarity for people in vulnerable situations	Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari
8.	17:15 – 18:15	Closing session Adoption of the outcome document	Plenary Hall of the Chamber of Deputies
Sabtu, 21 Juni 2025			
1.	09:00 – 13:00	Kepulangan Delri to Rome Fiumicino International Airport	

1. Opening Ceremony

Kamis, 19 Juni 2025, Pukul 14.30-15.30

Chamber of Deputies, Palazzo Montecitorio – Plenary Hall

Pada saat acara pembukaan, beberapa pembicara menyampaikan pandangan-pandangan terkait *the Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue*. Berikut adalah ringkasan poin-poin utama dari masing-masing pembicara dalam sesi pembukaan konferensi:

a. Lorenzo Fontana (Presiden Chamber of Deputies, Italia)

Lorenzo Fontana menyambut peserta dari berbagai negara yang mengikuti acara ini. Acara ini sebagai lanjutan acara yang pertama kali diadakan di Marrakesh, Maroko pada 2023 silam. Lorenzo juga menekankan pentingnya peran parlemen dalam membangun kepercayaan antaragama. Terakhir ia menegaskan komitmen Italia sebagai ruang dialog lintas budaya dan agama.

b. Ignazio La Russa (Presiden Senat, Italia)

Dalam sambutannya, Ignazio menyoroti nilai-nilai demokrasi dan kebebasan beragama. Ignazio menekankan dialog lintas iman sebagai alat mencegah konflik dan ekstremisme. Ignazio mengajak memperkuat solidaritas global melalui konferensi ini.

c. Dr. Tulia Ackson (Presiden IPU, Ketua Majelis Nasional Tanzania)

Presiden IPU mendukung kerja sama antara parlemen dan pemimpin agama. Menurut Tulia, dialog lintas agama sebagai jalan menuju masa depan inklusif dan damai. Di akhir ia mengajak peserta mengubah komitmen menjadi aksi nyata.

d. Dr. Francis Kuria (Sekretaris Jenderal Religions for Peace)

Francis Kuria berpandangan bahwa agama sebagai kekuatan perdamaian, bukan pemecah belah. Baginya, kemitraan antara pemimpin agama dan parlemen sangat penting. Sebagai masyarakat sipil, Francis mengajak seluruh peserta anggota parlemen, komunitas agama, dan akademisi untuk membangun kepercayaan dan harapan bersama melalui dialog berkelanjutan.

e. Uskup Agung Rino Fisichella (Pro-Prefek Dikasteri Evangelisasi, Penanggung Jawab Yubileum 2025)

Uskup Agung menyambut hangat aksi parlemen untuk dialog antaragama. Aksi parlemen ini bertepatan dengan Tahun Yubileum. Dalam tradisi Katolik, Yubileum diyakini sebagai waktu pembaruan dan harapan. Ia melihat iman dan dialog sebagai jalan rekonsiliasi dan persaudaraan universal. Ia menghimbau peserta untuk menghidupkan nilai kasih, pengampunan, dan solidaritas.

f. Pier Ferdinando Casini (Senator, Presiden Kehormatan IPU, Ketua Grup IPU Italia)

Pier mengawali sambutan dengan mengatakan IPU memiliki sejarah panjang dalam diplomasi parlemen untuk perdamaian. Baginya, dialog lintas agama harus



menjadi bagian dari kebijakan publik. Untuk itu, Pier mendorong Parlemen dunia diajak menjadi pelopor dunia yang adil dan damai.

2. General Debate

Jumat, 20 Juni 2025, Pukul 09:00 – 12:30

Chamber of Deputies, Palazzo Montecitorio – Plenary Hall

Sesi *General Debate* dalam *Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* mengundang anggota parlemen, pemimpin agama, perwakilan organisasi berbasis kepercayaan, PBB, organisasi internasional dan masyarakat sipil, serta akademisi untuk berbagi praktik baik tentang bagaimana keterlibatan parlemen dengan agama dan kepercayaan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih damai, adil, dan inklusif. Tujuan utama dari sesi ini adalah untuk memperkuat kepercayaan dan harapan bersama melalui pertukaran gagasan lintas sektor dan lintas iman.

Daftar pembicara disusun berdasarkan registrasi daring dan permintaan berbicara di lokasi. Para pembicara akan bergantian menyampaikan pandangan mereka, mencerminkan keberagaman perspektif dan pengalaman yang menjadi kekuatan utama konferensi ini.

Sesi dimulai dengan segmen tingkat tinggi yang menghadirkan Ketua Parlemen, tokoh agama terkemuka, dan pimpinan organisasi internasional. Setelah itu, sesi dilanjutkan dengan kontribusi dari delegasi nasional dan perwakilan komunitas global.

Setiap delegasi nasional dapat mendaftarkan maksimal dua anggota parlemen untuk berbicara, dengan total waktu enam menit. Jika hanya satu anggota parlemen yang berbicara, waktu maksimal yang diberikan adalah empat menit. Sementara itu, pemimpin agama, akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil masing-masing diberikan waktu tiga menit untuk menyampaikan pandangan mereka. Berikut adalah poin-poin utama dari masing-masing pembicara dalam sesi *General Debate Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* di Roma, 20 Juni 2025:



a. Ambassador Simona-Mirela Miculescu (Presiden Konferensi Umum UNESCO ke-42)

Simona, dalam sesi *General Debate*, menekankan bahwa perdamaian harus dibangun dalam pikiran manusia, sesuai dengan konstitusi UNESCO. Dia berpendapat bahwa UNESCO adalah laboratorium ide untuk memajukan perdamaian melalui pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, dan informasi. Dalam konteks ini, ia menyoroti pentingnya pendidikan untuk perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Simona juga menyampaikan bahwa dialog antaragama adalah alat penting untuk membangun kepercayaan dan harapan bersama.

b. Mr. Miguel Moratinos (Perwakilan Tinggi Aliansi Peradaban PBB)

Miguel menyampaikan bahwa dunia menghadapi bukan benturan peradaban, tetapi benturan kepentingan dan ketidaktahuan, oleh karena itu ia menekankan bahwa dialog antaragama adalah tindakan keberanian dan harapan, bukan sekadar wacana. Miguel menyerukan agar parlemen dan pemimpin agama bekerja sama untuk melawan intoleransi, ujaran kebencian, dan ekstremisme. Terakhir ia menegaskan bahwa keragaman adalah kekuatan, bukan ancaman.

c. Sayyed Jawad El Khoei (Sekretaris Jenderal Al-Khoei Institute, Irak)

Jawad menyampaikan bahwa perdamaian adalah bagian dari identitas dan ajaran Islam, bukan hanya slogan. Ia menekankan pentingnya kerja sama antaragama dan antarmazhab, termasuk antara pemimpin Muslim dan Kristen. Ia menyebutkan inisiatif bersama seperti kunjungan Paus Fransiskus ke Najaf sebagai contoh nyata dialog lintas iman. Ia juga menyoroti peran pemuda dan akademisi dalam membangun masa depan yang damai dan inklusif.

d. Archbishop Ioannes Tsaftaridis (Uskup Agung Zambia dan Mozambik)

Ioannes menyampaikan pidato dalam bahasa Yunani sebagai simbol warisan budaya dan teologis Gereja Ortodoks. Dalam sambutannya, ia menyoroti diplomasi agama melalui kerja sama antara Gereja Ortodoks dan parlemen di



Afrika. Ia menyampaikan inisiatif seperti penanaman Pohon Zaitun Perdamaian Olimpiade di Parlemen Zambia sebagai simbol perdamaian. Ia juga menyerukan kerja sama global antara lembaga keagamaan dan legislatif untuk pembangunan berkelanjutan dan koeksistensi damai.

e. Youth Representative

Ia menyampaikan pengalaman pribadi sebagai generasi muda yang terdampak konflik, karena itu ia menekankan bahwa pendidikan perdamaian harus dimulai sejak dini. Ia menyerukan agar suara anak muda didengar dalam proses pengambilan keputusan. Ia mengajak pemimpin agama dan politik untuk membuka ruang dialog dan partisipasi bagi generasi muda.

3. Thematic Working Session 1: Promoting Peaceful Coexistence

Kamis, 19 Juni 2025, Pukul 09.30-11.00

Chamber of Deputies, Aula dei Gruppi Parlamentari

Sesi ini berangkat dari pemikiran bahwa agama dan kepercayaan membentuk identitas serta nilai masyarakat, dan dapat memperkuat ikatan sosial melalui nilai-nilai positif seperti kasih, keadilan, dan kepedulian. Namun, jika disalahgunakan, agama juga bisa menjadi sumber konflik dan eksklusif. Parlemen memiliki peran penting dalam mempromosikan kohesi sosial dengan mengangkat nilai-nilai positif agama, menjamin kebebasan beragama, dan membela kelompok terpinggirkan. Sesi ini menghadirkan para ahli untuk berbagi praktik baik dalam membangun koeksistensi damai.

Berikut adalah poin-poin yang disampaikan pembicara:

a. Moderator: Ms. Deepika Singh (Deputy Secretary General, Religions for Peace)

Deepika membuka sesi dengan pernyataan yang menekankan pentingnya dialog lintas agama sebagai fondasi koeksistensi damai. Ia mengajak peserta untuk berbagi praktik baik dan pengalaman nyata dalam membangun masyarakat inklusif.



b. Ms. Mónika Bartos (Anggota Majelis Nasional, Hongaria)

Mónika menyoroti peran parlemen dalam membentuk kebijakan yang mendukung toleransi dan keberagaman. Ia menekankan pentingnya pendidikan dan legislasi untuk mencegah polarisasi sosial.

c. Mr. Abdulla Almanai (Direktur Eksekutif, King Hamad Global Centre for Coexistence and Tolerance, Bahrain)

Dalam kapasitasnya sebagai Direktur Eksekutif King Hamad Global Centre for Existence and Tolerance Abdullah menyampaikan inisiatif Bahrain dalam mempromosikan toleransi antaragama dan budaya. Ia menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk memperkuat nilai-nilai koeksistensi.

d. Ms. Radi Lamia (Presiden Pendiri, Foundation Mémoires pour l'Avenir, Maroko)

Radi Lamia menyoroti pentingnya memori kolektif dan pendidikan sejarah dalam membangun toleransi. Ia menyampaikan peran budaya dan seni dalam menyatukan masyarakat yang beragam.



Gambar 1.0 Delegasi BKSAP DPR RI dalam pertemuan *the Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* pada 19-21 Juni 2025

Respondents:

3. Dr. Leo Igwe (Anggota Dewan, Humanists International)

Leo Igwe menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berkeyakinan, termasuk bagi mereka yang tidak beragama. Ia juga mengajak untuk menghindari eksklusivisme dalam dialog lintas iman.

4. Ms. Rachel Forster (Search for Common Ground)

Rachel menyoroti pendekatan berbasis komunitas dalam membangun kepercayaan dan mencegah konflik. Ia menekankan pentingnya dialog yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat damai.

4. Thematic working session 2: Lessons from the Marrakesh Declaration (2016): Upholding the rights of religious minorities

Kamis, 19 Juni 2025, Pukul 11.30-13.00

Chamber of Deputies, Aula dei Gruppi Parlamentari

Deklarasi Marrakesh ditandatangani pada 2016 oleh lebih dari 250 tokoh Muslim, menegaskan komitmen Islam terhadap perlindungan hak-hak minoritas agama di negara mayoritas Muslim, berdasarkan prinsip Piagam Madinah. Deklarasi ini menyerukan koeksistensi damai dan menolak diskriminasi serta kekerasan atas

dasar agama. Sesi ini membahas kontribusi deklarasi dalam menjamin hak kebebasan beragama, serta peran parlemen dan pemimpin agama dalam mengimplementasikannya. Dukungan diberikan oleh Abu Dhabi Peace Forum dan Network for Religious and Traditional Peacemakers.

Berikut adalah poin-poin utama dari masing-masing pembicara dalam Thematic Working Session 2: Lessons from the Marrakesh Declaration (2016): Upholding the Rights of Religious Minorities pada *Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue*:



a. Moderator: Dr. Mohamed Elsanousi (Executive Director, Network for Religious and Traditional Peacemakers; Komisioner USCIRF)

Mohamed menekankan bahwa Deklarasi Marrakesh adalah tonggak penting dalam perlindungan hak-hak minoritas agama di negara mayoritas Muslim. Ia mengajak peserta untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip deklarasi dalam kebijakan nasional dan kerja sama lintas agama. Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia universal untuk membangun masyarakat inklusif.

b. Sheikh Al-Mahfoudh Bin Bayyah (Abu Dhabi Forum for Peace)

Sheikh Al-Mahfoudh menyampaikan bahwa Deklarasi Marrakesh adalah kebangkitan institusional dari Piagam Madinah, yang menjamin hak dan koeksistensi antar komunitas. Selain itu, dikatakannya pula bahwa agama harus menjadi kekuatan untuk perdamaian dan keadilan, bukan alat eksklusif. Ia juga menyerukan model kewarganegaraan inklusif yang menjamin kesetaraan tanpa memandang identitas agama atau etnis.

c. Dr. Katherine Marshall (Senior Fellow, Berkley Center; Board Member, G20 Interfaith Forum)

Katherine mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas iman dalam pembangunan global. Ia juga menyoroti bahwa agama dan nilai-nilai spiritual dapat memperkuat kebijakan publik yang adil dan berkelanjutan. Ia mengajak untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Deklarasi Marrakesh dalam kerja sama internasional dan kebijakan pembangunan.

d. Mr. Robert Amuma Madubi (Founder, Badili Tana Initiative, Kenya)

Robert berbagi pengalaman dari Kenya dalam mempromosikan toleransi antaragama di tingkat komunitas. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya pemberdayaan pemuda dan perempuan dalam membangun perdamaian. Ia menekankan pendekatan lokal berbasis komunitas adalah kunci keberhasilan implementasi prinsip-prinsip Marrakesh.

e. Respondent: Ms. Nejat Mehdi Oumer (Women and Youth Focal Person, Ethiopian Interfaith Forum)

Nejat Mehdi mengomentari paparan panelis berpendapat akan pentingnya melibatkan perempuan dan pemuda dalam dialog lintas iman. Ia menyampaikan bahwa Deklarasi Marrakesh adalah alat perdamaian yang belum cukup dikenal, padahal sangat relevan untuk konteks Afrika Timur. Ia mengajak untuk mendiseminasikan prinsip-prinsip deklarasi ke akar rumput dan menjadikannya bagian dari pendidikan perdamaian.

5. Panel 1: Advancing inclusive societies, ensuring freedom of religion or belief

Jumat, 20 Juni 2025, Pukul 09:30 – 10:45

Chamber of Deputies, Aula Gruppi parlamentari

Kebebasan berpikir, hati nurani, agama, atau kepercayaan (FoRB) adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen internasional. FoRB berperan penting dalam membangun masyarakat yang adil dan damai, serta menjadi indikator inklusi sosial. Meski dijamin, pelanggaran terhadap FoRB masih terjadi di berbagai negara. Panel ini menghadirkan para ahli dan jaringan parlemen untuk berbagi praktik baik dan mekanisme dalam memajukan masyarakat inklusif melalui perlindungan FoRB.

a. Ms. Tanya Awad Ghorra (Senior Trainer, Adyan Foundation, Lebanon)

Tanya Awad memandu sesi dengan menyampaikan betapa komunikasi non-kekerasan dan pendidikan inklusif untuk membangun masyarakat yang saling menghormati. Ia berpendapat peran media dan pendidikan strategis dalam membentuk kesadaran publik tentang keberagaman dan hak beragama. Dia mengajak untuk menghapus budaya kekerasan dan diskriminasi melalui pendekatan empatik dan transformasi sosial.

b. Ms. Fernanda San Martín Carrasco (Direktur IPPFoRB, mantan anggota parlemen Bolivia)

Fernanda menyampaikan tantangan global dalam menegakkan kebebasan beragama atau berkeyakinan (FoRB). Ia menekankan bahwa anggota parlemen memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk melindungi hak-hak minoritas agama. Fernanda membagikan pengalamannya di IPPFoRB dalam memberikan dukungan lintas negara kepada legislator yang memperjuangkan FoRB.

c. Professor Ahmed Shaheed (Profesor Hukum HAM Internasional, mantan Pelapor Khusus PBB untuk FoRB)

Ahmed Shaheed, dalam paparannya, menyuarakan kebebasan beragama dan berekspresi adalah hak yang saling memperkuat. Ia mengabarkan tantangan yang dihadapi minoritas agama dalam situasi konflik dan ketidakamanan. Ia mendorong reformasi kebijakan dan praktik untuk melindungi hak-hak kelompok rentan secara global.

d. Rabbi David Saperstein (Senior Advisor, Union for Reform Judaism; mantan Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional)

Rabbi David mengatakan pentingnya kerja sama lintas agama dan lintas politik untuk memperjuangkan keadilan sosial. Ia berbagi pengalaman dalam membentuk kebijakan dan advokasi HAM di tingkat nasional dan internasional. Ia mendorong agar agama menjadi kekuatan untuk inklusi, bukan eksklusif.

e. Ms. Bani Dugal (Perwakilan Baha'i International Community untuk PBB; Co-President Religions for Peace)

Bani Dugal mengungkapkan prinsip kesatuan umat manusia sebagai landasan masyarakat inklusif. Ia menyuarakan pentingnya keterlibatan perempuan dan pemuda dalam dialog lintas agama. Ia meminta kemauan politik global untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan.

f. Dr. Michael Wiener (Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB)

Michael menyatakan bahwa parlemen memiliki peran kunci dalam menjamin hak atas kebebasan beragama melalui legislasi. Oleh karena itu,



ia memberikan pendapat betapa pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam merespons ujaran kebencian dan diskriminasi agama. Ia juga menyerukan kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk memperkuat perlindungan HAM.

g. Dr. Susan Kerr (Senior Advisor on Freedom of Religion or Belief, OSCE ODIHR – UK)

Sebagai penanggap, Susan Kerr berpendapat bahwa dialog antaragama dan kepercayaan sangat penting untuk memperkuat hak asasi manusia dan keamanan. Ia memberikan pemahaman bahwa dialog yang bermakna hanya mungkin terjadi jika didasarkan pada kebebasan berpikir, hati nurani, agama, atau kepercayaan. Ia menyerukan agar negara-negara bersikap adil dan membangun kepercayaan dengan komunitas agama dan kepercayaan serta menekankan bahwa penghormatan penuh terhadap HAM, kesetaraan, dan otonomi komunitas agama/kepercayaan harus menjadi inti dari setiap dialog.

h. Mr. Honelegn Berhanu Tadesse (Project Coordinator, Tearfund Ethiopia – Youth Representative)

Responden lainnya, Honelegn, menyuarakan pentingnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan perdamaian dan transformasi sosial. Dia berbagi pengalamannya dari Ethiopia tentang penguatan komunitas melalui pendekatan berbasis gereja dan dialog antaragama. Ia berkata bahwa pemuda harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan advokasi kebijakan inklusif. Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan, teknologi, dan nilai spiritual harus berjalan beriringan dalam membangun masyarakat yang adil dan damai.



6. Panel 2 Promoting ethical leadership at all levels, investing in education for peace

Jumat, 20 Juni 2025, Pukul 11:15 – 12:30

Chamber of Deputies, Aula Gruppi parlamentari

Kepemimpinan etis dan pendidikan perdamaian saling berkaitan dalam membentuk masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai seperti integritas, inklusi, dan solidaritas merupakan inti dari mandat parlemen dan pemimpin agama. Pendidikan perdamaian, terutama yang mencakup literasi agama, HAM, dan media, membantu mencegah konflik, melawan intoleransi, dan memperkuat penghormatan terhadap hukum. Panel ini membahas komponen utama dari kepemimpinan etis dan pendidikan perdamaian sebagai fondasi pembangunan sosial.

Berikut adalah poin-poin utama dari para pembicara dalam sesi Panel: Promoting Ethical Leadership at All Levels, Investing in Education for Peace pada *Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue*:

a. Moderator: Dr. Fadi Daou (Executive Director, Globethics)

Fadi Daou memulai sesi dengan mengatakan bahwa kepemimpinan etis adalah kunci membangun kepercayaan dan perdamaian. Ia berpendapat perlunya pendidikan nilai-nilai universal seperti keadilan, integritas, dan empati dalam membentuk generasi pemimpin masa depan. Maka, ia mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi polarisasi dan dehumanisasi dalam masyarakat. Ia memoderasi dan menyampaikan hasil panel dalam sesi penutupan.

b. Ambassador Simona-Mirela Miculescu (Presiden Konferensi Umum UNESCO ke-42)

Simona menyampaikan bahwa pendidikan adalah fondasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. UNESCO berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan melalui pendidikan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ia mengungkapkan bahwa kepemimpinan etis harus dimulai dari ruang kelas dan komunitas lokal.

c. Ms. Antonella Sberna (Wakil Presiden Parlemen Eropa)

Antonella menyoroti pentingnya dialog antaragama dan antarbudaya sebagai pilar demokrasi Eropa. Ia menekankan bahwa kata-kata dan komunikasi yang bijak dapat membangun inklusi dan mengatasi prasangka. Antonella mendorong implementasi Pasal 17 Perjanjian Uni Eropa untuk memperkuat kerja sama antar komunitas etis dan agama.

d. Dr. Ibrahim Negm (Penasihat Senior Mufti Besar Mesir)

Ibrahim Negm menyerukan kembali ke nilai-nilai spiritual dan moral agama sebagai solusi atas krisis global. Ia menekankan bahwa institusi keagamaan adalah penjaga kompas moral masyarakat. Ia menolak eksploitasi agama untuk kekerasan dan menyerukan kerja sama lintas agama untuk perdamaian global.

e. Dr. Chinmay Pandya (Ketua South Asian Institute of Peace and Reconciliation, India)

Chinmai mengungkapkan bahwa pendidikan berbasis kesadaran dan spiritualitas adalah jalan menuju perdamaian. Menurutnya, penting melakukan integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya India. Ia mendorong kepemimpinan muda dan pendidikan karakter sebagai fondasi masyarakat damai.

f. Ms. Joy Muthoni Gitau (Direktur Eksekutif, Amani Communities Africa – Perwakilan Pemuda)

Joy Muthoni menyampaikan bahwa perdamaian dimulai dari dalam diri dan meluas ke komunitas. Betapa pentingnya pendidikan resolusi konflik dan mediasi di sekolah dan komunitas. Ia berharap pemuda untuk menjadi agen perubahan melalui dialog dan refleksi pribadi.

g. Sayyed Jawad El Khoei (Sekretaris Jenderal, Al-Khoei Institute, Irak)

Sebagai responden pertama, Sayyed Jawad mengutarakan pendapatnya bahwa perdamaian adalah bagian dari identitas dan ajaran Islam. Ia menggaungkan kerja sama lintas agama dan lintas mazhab untuk membangun masyarakat inklusif. Ia berpendapat pemuda dan akademisi harus dilibatkan dalam proses perdamaian.

h. Mr. Elias Szczytnicki (Sekretaris Jenderal, Religions for Peace – Amerika Latin dan Karibia)

Dalam posisinya sebagai responden kedua, Elias menekankan pentingnya kerja sama antaragama dalam diplomasi internasional dan pembangunan perdamaian. Ia juga mengatakan bahwa agama harus menjadi mitra aktif dalam kebijakan publik dan advokasi HAM. Ia mendorong penguatan jaringan lintas agama untuk menghadapi tantangan regional dan global.

B. Gambaran Umum

Gambaran umum tentang acara **Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Strengthening Trust and Embracing Hope for Our Common Future**, yang diselenggarakan di Roma pada 19-21 Juni 2025 :

Acara ini memiliki tujuan dan konteks Tujuan utama adalah memperkuat dialog antar-agama dan antar-kepercayaan (interfaith/inter-belief dialogue) melalui peran parlemen dan lembaga agama/kepercayaan, dengan sikap inklusif dan berdasar penghormatan hak-hak asasi. Konferensi ini berlangsung di tahun Jubileum (Jubilee Year) yang ditetapkan dalam tradisi Katolik, sehingga ada unsur simbolik “ziarah harapan” (pilgrims of hope) — sebuah dorongan untuk merangkul harapan di tengah konflik global, polarisasi, dan penyalahgunaan agama/kepercayaan.

Dalam konteks global: adanya pengakuan bahwa agama/kepercayaan sering kali menjadi faktor baik dalam pembangunan perdamaian maupun sumber ketegangan — sehingga parlemen dan pemimpin agama/kepercayaan dipandang memiliki tanggung-jawab bersama untuk mempromosikan keadilan, martabat manusia, dan koeksistensi damai.





Gambar 1.1 Pertemuan ini menggarisbawahi dialog antar-agama dan antar-kepercayaan melalui peran parlemen dan lembaga agama/kepercayaan

C. Partisipasi Delegasi Bksap DPR RI

Delegasi BKSAP DPR RI berpartisipasi aktif dan menyampaikan intervensi dalam sesi sebagai berikut:

1. Thematic working session 1 Promoting peaceful coexistence

Dalam sesi ini, delegasi BKSAP DPR RI Abraham Sridjaja menyampaikan intervensi. Berikut adalah poin penting yang disampaikan anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Golkar dalam *Thematic Working Session 1: Promoting Peaceful Coexistence*:

- Dalam konferensi Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue, Abraham Sridjaja menegaskan bahwa koeksistensi damai bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan kehadiran saling menghormati, pemahaman, dan tanggung jawab bersama. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang mendorong
- toleransi, melindungi kebebasan beragama, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan.

- Ia menyoroti pengalaman Indonesia sebagai negara dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan berbagai agama, yang menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika—kesatuan dalam keberagaman. Meski Konstitusi dan Pancasila menjamin kebebasan beragama, tantangan seperti ekstremisme, diskriminasi, dan misinformasi digital tetap menjadi ancaman bagi harmoni sosial.
- Melalui dialog lintas agama, kerja sama kemanusiaan, dan perayaan bersama, masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa toleransi dapat berkembang menjadi kolaborasi nyata. Pemerintah dan DPR RI, bersama organisasi keagamaan, terus mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif melalui regulasi, forum lintas iman, dan pendidikan.
- Dalam semangat konferensi ini, Abraham Sridjaja mengajak seluruh peserta untuk mengubah dialog menjadi aksi nyata: memperkuat perlindungan hukum, mendorong keterlibatan lintas budaya, dan menjunjung martabat setiap individu tanpa memandang keyakinan. Ia menutup dengan seruan bahwa perbedaan seharusnya menjadi sumber inspirasi untuk persatuan yang lebih dalam.

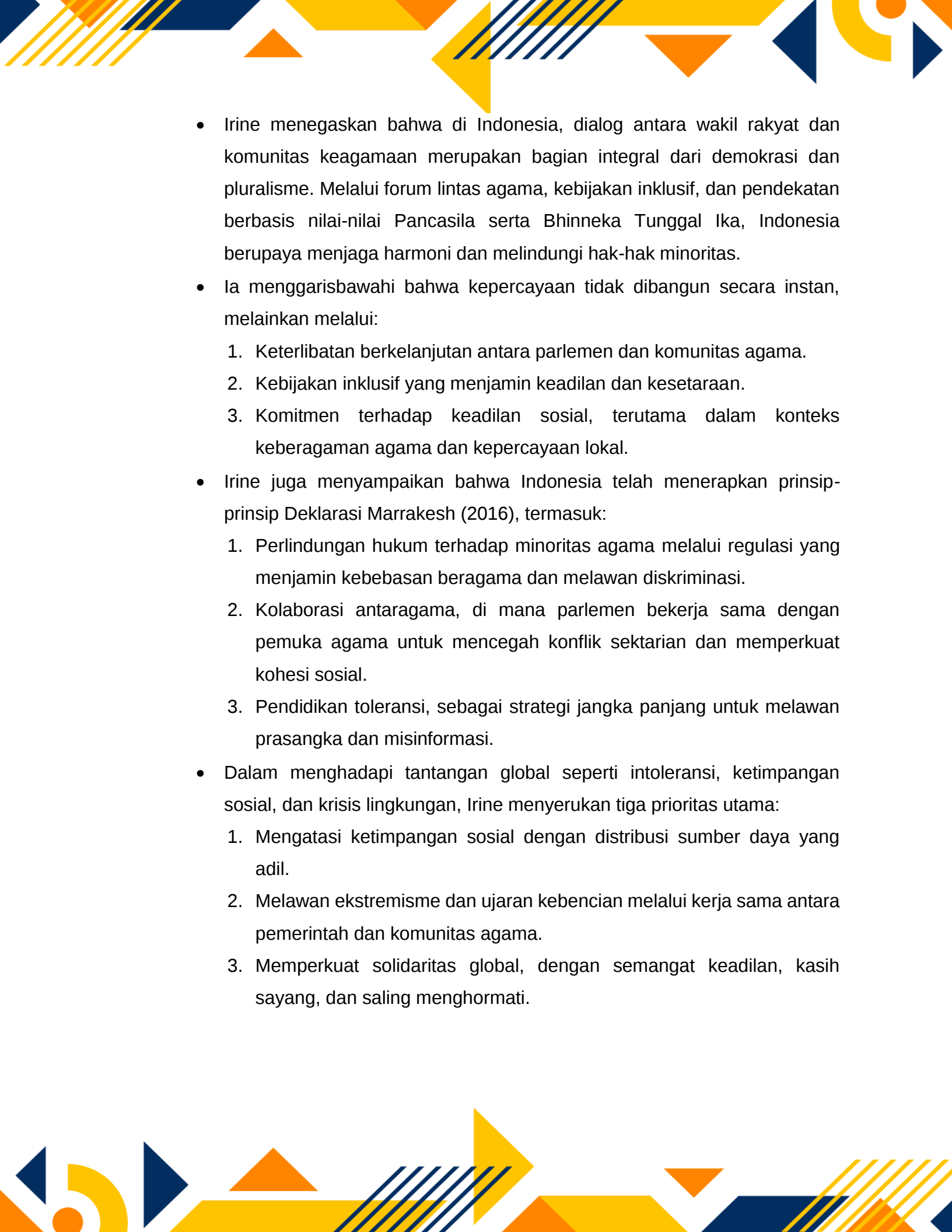
2. Thematic working session 2: Lessons from the Marrakesh Declaration (2016): Upholding the rights of religious minorities

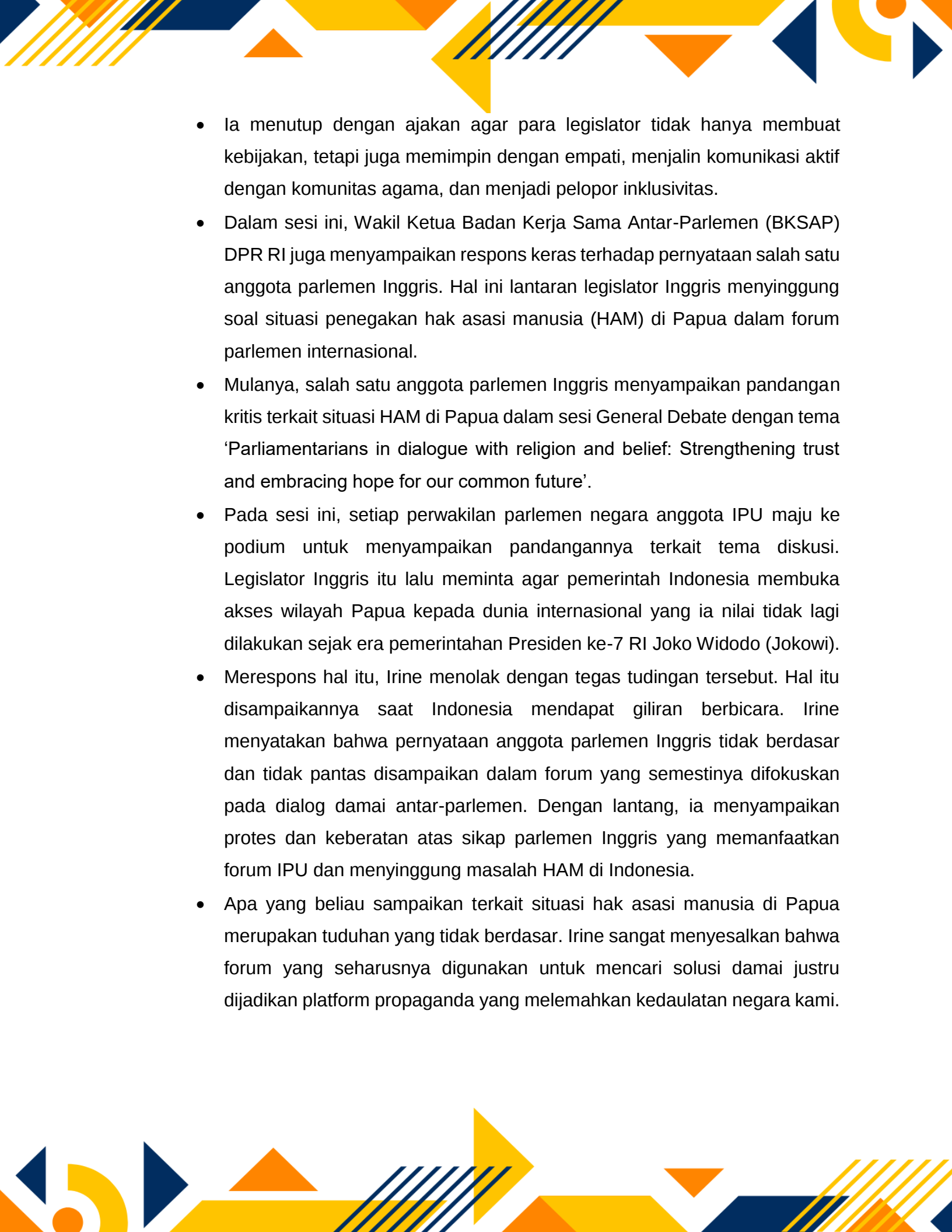
Dalam sesi tematik kedua Konferensi Parlemen tentang Dialog Antaragama yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union dan Parlemen Italia dengan dukungan dari Religions for Peace pada 19 Juni 2025, delegasi BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez menyampaikan intervensi bertema “Pelajaran dari Deklarasi Marrakesh (2016): Menegakkan Hak-Hak Minoritas Agama”. Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan politikus PDI-P tersebut:

- Sebagai wakil dari Indonesia—negara demokrasi dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia—Gilang menekankan pentingnya prinsip Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) dan nilai-nilai Pancasila yang menjamin kebebasan serta kesetaraan beragama. Ia mengaitkan semangat Deklarasi Marrakesh, yang berakar pada Piagam Madinah, dengan komitmen konstitusional Indonesia terhadap perlindungan hak-hak minoritas agama.
- Dalam pidatonya, Gilang mengakui bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam membangun harmoni antaragama, tantangan seperti diskriminasi, eksklusivitas sosial, dan ketegangan sektarian masih terjadi. Ia menekankan bahwa toleransi beragama harus dipromosikan secara aktif melalui:
 1. Kebijakan hukum: Memperkuat perlindungan terhadap diskriminasi.
 2. Dialog antaragama: Mendorong komunikasi lintas keyakinan.
 3. Pendidikan: Mengintegrasikan nilai toleransi dalam kurikulum.
 4. Kemitraan dengan masyarakat sipil: Melawan ujaran kebencian dan ekstremisme.
- Indonesia juga mengusung konsep *wasatiyyah* (moderasi beragama) sebagai pendekatan untuk mendorong keseimbangan, toleransi, dan hidup berdampingan secara damai.
- Gilang mengakhiri dengan menyerukan kepada para legislator dunia untuk menjadikan Deklarasi Marrakesh sebagai panggilan untuk bertindak: menegakkan hak-hak beragama, memperkuat kolaborasi antaragama, dan menjadikan keberagaman sebagai fondasi persatuan global.

3. General Debate: Parliamentarians in dialogue with religion and belief: Strengthening trust and embracing hope for our common future

Dalam sesi General Debate Konferensi Parlemen Kedua tentang Dialog Antaragama yang berlangsung pada 20 Juni 2025 di Plenary Hall, Ketua Delegasi BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan pandangan strategis mengenai pentingnya membangun kepercayaan dan harapan bersama antara parlemen dan komunitas agama.

- 
- Irine menegaskan bahwa di Indonesia, dialog antara wakil rakyat dan komunitas keagamaan merupakan bagian integral dari demokrasi dan pluralisme. Melalui forum lintas agama, kebijakan inklusif, dan pendekatan berbasis nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia berupaya menjaga harmoni dan melindungi hak-hak minoritas.
 - Ia menggarisbawahi bahwa kepercayaan tidak dibangun secara instan, melainkan melalui:
 1. Keterlibatan berkelanjutan antara parlemen dan komunitas agama.
 2. Kebijakan inklusif yang menjamin keadilan dan kesetaraan.
 3. Komitmen terhadap keadilan sosial, terutama dalam konteks keberagaman agama dan kepercayaan lokal.
 - Irine juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip Deklarasi Marrakesh (2016), termasuk:
 1. Perlindungan hukum terhadap minoritas agama melalui regulasi yang menjamin kebebasan beragama dan melawan diskriminasi.
 2. Kolaborasi antaragama, di mana parlemen bekerja sama dengan pemuka agama untuk mencegah konflik sektarian dan memperkuat kohesi sosial.
 3. Pendidikan toleransi, sebagai strategi jangka panjang untuk melawan prasangka dan misinformasi.
 - Dalam menghadapi tantangan global seperti intoleransi, ketimpangan sosial, dan krisis lingkungan, Irine menyerukan tiga prioritas utama:
 1. Mengatasi ketimpangan sosial dengan distribusi sumber daya yang adil.
 2. Melawan ekstremisme dan ujaran kebencian melalui kerja sama antara pemerintah dan komunitas agama.
 3. Memperkuat solidaritas global, dengan semangat keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati.

- 
- Ia menutup dengan ajakan agar para legislator tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga memimpin dengan empati, menjalin komunikasi aktif dengan komunitas agama, dan menjadi pelopor inklusivitas.
 - Dalam sesi ini, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI juga menyampaikan respons keras terhadap pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris. Hal ini lantaran legislator Inggris menyinggung soal situasi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam forum parlemen internasional.
 - Mulanya, salah satu anggota parlemen Inggris menyampaikan pandangan kritis terkait situasi HAM di Papua dalam sesi General Debate dengan tema 'Parliamentarians in dialogue with religion and belief: Strengthening trust and embracing hope for our common future'.
 - Pada sesi ini, setiap perwakilan parlemen negara anggota IPU maju ke podium untuk menyampaikan pandangannya terkait tema diskusi. Legislator Inggris itu lalu meminta agar pemerintah Indonesia membuka akses wilayah Papua kepada dunia internasional yang ia nilai tidak lagi dilakukan sejak era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
 - Merespons hal itu, Irine menolak dengan tegas tuduhan tersebut. Hal itu disampaikannya saat Indonesia mendapat giliran berbicara. Irine menyatakan bahwa pernyataan anggota parlemen Inggris tidak berdasar dan tidak pantas disampaikan dalam forum yang semestinya difokuskan pada dialog damai antar-parlemen. Dengan lantang, ia menyampaikan protes dan keberatan atas sikap parlemen Inggris yang memanfaatkan forum IPU dan menyinggung masalah HAM di Indonesia.
 - Apa yang beliau sampaikan terkait situasi hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Irine sangat menyesalkan bahwa forum yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi damai justru dijadikan platform propaganda yang melemahkan kedaulatan negara kami.

- Menurut legislator asal daerah pemilihan Maluku Utara forum ini bukan tempat yang tepat untuk membahas isu Papua. Irine dengan tegas menolak pernyataan itu.

4. **Panel 1 Advancing inclusive societies, ensuring freedom of religion or belief**

Dalam Panel 1 bertajuk “Advancing inclusive societies, ensuring freedom of religion or belief” yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union dan Parlemen Italia dengan dukungan dari Religions for Peace, anggota BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez menyampaikan pandangan dan komitmen Indonesia dalam memajukan masyarakat yang inklusif dan menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Dalam pidatonya, Politikus PDIP tersebut menyampaikan poin-poin penting sebagai berikut:

- Kebebasan beragama atau berkeyakinan (FoRB) merupakan hak asasi yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Paus Fransiskus menyebut FoRB sebagai indikator utama keadilan dalam suatu masyarakat. Namun, tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dari pelanggaran terhadap hak ini.
- Indonesia, lanjut Gilang, menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang inklusif. Berbagai inisiatif telah dikembangkan, seperti dialog komunitas lintas agama, pembentukan Dewan Antaragama Indonesia, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan penting dalam membangun pemahaman dan mencegah konflik.
- Parlemen Indonesia juga aktif bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional untuk menangani pelanggaran terhadap FoRB. Bentuk kerja sama ini meliputi pertukaran praktik terbaik, dukungan terhadap inisiatif akar rumput, serta pemberdayaan komunitas terpinggirkan melalui reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas.

- Lebih lanjut, DPR RI mendukung program pelatihan bagi pemimpin lokal, pendidik, dan generasi muda tentang toleransi beragama dan kewarganegaraan inklusif. Program ini bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ujaran kebencian, radikalisasi, dan diskriminasi.
- Gilang mengatakan melalui upaya ini, para legislator Indonesia tidak hanya merespons pelanggaran FoRB, tetapi juga secara proaktif membentuk masyarakat yang menghormati dan melindungi keberagaman.
- Gilang menutup dengan ajakan kepada seluruh peserta konferensi untuk bersama-sama membangun model inklusi yang menginspirasi kemajuan dan menjamin martabat serta kesetaraan bagi semua.

5. Panel 2 Promoting ethical leadership at all levels, investing in education for peace

Dalam sesi Panel 2 bertajuk “Promoting ethical leadership at all levels, investing in education for peace”, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya integritas dan pendidikan perdamaian sebagai fondasi masyarakat yang adil dan harmonis.

- Dalam pidatonya, Bramantyo menyampaikan poin-poin penting sebagai berikut:
- Di era di mana integritas menjadi penuntun arah, kepemimpinan etis harus menjadi pilar utama dalam setiap tingkatan pemerintahan. Di Indonesia, kami meyakini bahwa kepemimpinan yang beretika adalah dasar dari akuntabilitas demokratis, transparansi, dan kepercayaan—unsur penting untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan menjamin perdamaian.
- DPR RI telah mengambil langkah aktif untuk memperkuat norma-norma etika melalui peningkatan pengawasan internal, penerapan kode etik yang jelas, serta memastikan bahwa setiap keputusan legislatif mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan integritas.

- Lebih lanjut, Indonesia juga meningkatkan investasi dalam program pendidikan yang menekankan pada hidup berdampingan secara damai, toleransi, dan berpikir kritis. Program seperti Sekolah Damai dan Madrasah Ramah Anak telah mengintegrasikan pendidikan perdamaian, resolusi konflik, dan toleransi beragama ke dalam kurikulum mereka.
- Inisiatif seperti Peace Goes to School juga disebut sebagai contoh nyata pemberdayaan generasi muda untuk membangun jembatan antarbudaya dan antaragama, menciptakan lingkungan di mana dialog mengalahkan perpecahan.
- Dengan mengintegrasikan kepemimpinan etis dan pendidikan perdamaian yang komprehensif, Indonesia sedang membangun jalan menuju tata kelola yang bertanggung jawab dan harmoni sosial yang berkelanjutan.
- Bramantyo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berbagi praktik terbaik di tingkat internasional, mendukung reformasi, dan memastikan bahwa sistem politik dan pendidikan saling bersinergi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan damai.

6. Output : Roma Communiqué

Roma Communiqué merupakan dokumen hasil dari *Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* yang diselenggarakan di Roma pada 19–21 Juni 2025. Komunike ini mencerminkan komitmen global para anggota parlemen, pemimpin agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kepercayaan dan menumbuhkan harapan demi masa depan bersama yang damai dan inklusif.

Dalam konteks dunia yang dilanda konflik, polarisasi, dan krisis solidaritas, komunike ini menegaskan pentingnya dialog antaragama sebagai fondasi untuk membangun kohesi sosial, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong tata kelola yang etis dan inklusif. Komunike ini juga menyerukan tindakan konkret dari parlemen di seluruh dunia untuk melawan ujaran



kebencian, memperkuat pendidikan perdamaian, dan menjamin partisipasi setara bagi perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.

Sebagai kelanjutan dari semangat *Marrakesh Communiqué (2023)*, *Roma Communiqué* menjadi seruan global untuk menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, dan menjalin kolaborasi lintas iman demi terciptanya masyarakat yang adil, damai, dan berkelanjutan.

Berikut adalah ringkasan Roma Communiqué :

Pernyataan Utama:

a. Dialog Antaragama sebagai Alat Perdamaian:

- Berdasarkan martabat manusia, hak asasi, dan inklusivitas.
- Menangkal polarisasi, dehumanisasi, dan narasi beracun.
- Membangun kepercayaan antar komunitas dan institusi.

b. Martabat Manusia sebagai Fondasi:

- Setiap individu berhak dihormati tanpa memandang agama, etnis, atau gender.
- Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah kunci perdamaian dan pembangunan.

c. Kepemimpinan Etis:

- Parlemen dan pemimpin agama harus memimpin dengan integritas, keadilan, dan kasih sayang.
- Kepemimpinan harus mendorong inklusi, akuntabilitas, dan pelayanan untuk kebaikan bersama.

d. Pendidikan untuk Perdamaian:

- Investasi dalam kurikulum yang menumbuhkan empati, berpikir kritis, dan literasi agama.
 - Meningkatkan literasi digital dan HAM untuk melawan retorika yang memecah belah.
- 

e. **Perlindungan Hak:**

- Menegaskan kembali kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan sebagai hak universal.
- Menghapus hukum diskriminatif dan memperkuat perlindungan hukum bagi minoritas.

f. **Kesetaraan Gender:**

- Hak penuh dan setara bagi perempuan dan anak perempuan.
- Perempuan harus dilibatkan dalam kehidupan politik dan keagamaan.
- Menolak segala upaya yang menghambat kemajuan kesetaraan gender.

g. **Pemberdayaan Pemuda:**

- Anak muda harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang masa depan.
- Diakui sebagai agen perdamaian dan pemahaman antaragama.

A. Rekomendasi Tindakan Parlemen:

- Memperkuat perlindungan hukum atas kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
- Melawan ujaran kebencian dan ancaman digital melalui regulasi dan media yang etis.
- Mendorong kepemimpinan etis dan tata kelola inklusif.
- Membentuk mekanisme parlemen untuk dialog antaragama.
- Mendukung pendidikan perdamaian dan literasi agama.
- Menjamin partisipasi inklusif kelompok rentan.
- Berpartisipasi dalam kampanye IPU tentang kesetaraan gender dan pemuda.
- Melindungi ruang sipil dan tempat ibadah.
- Berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan organisasi berbasis agama.
- Menyelenggarakan sesi parlemen khusus untuk dialog antaragama.
- Berkontribusi dalam pengembangan pedoman global untuk hidup berdampingan secara damai.



B. Komitmen Penutup :

Peserta meninggalkan Roma dengan semangat harapan dan solidaritas, berkomitmen untuk membawa semangat tersebut ke parlemen, komunitas, dan dunia yang lebih luas.



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Event parlemen *Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* yang diselenggarakan di Roma, Italia pada 19–21 Juni 2025 berjalan dengan lancar dan sukses.
- b. Konferensi Parlemen Kedua tentang Dialog Antaragama yang diselenggarakan di Roma pada 19–21 Juni 2025 berhasil mempertemukan lebih dari 600 anggota parlemen, pemimpin agama, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dari hampir 100 negara.
- c. Dalam suasana global yang penuh ketidakpastian, konferensi ini menegaskan bahwa dialog antaragama adalah instrumen vital untuk membangun kepercayaan, harapan, dan masa depan bersama yang damai dan inklusif.
- d. Interfaith dialogue dipandang sebagai alat untuk mencegah polarisasi, dehumanisasi, dan penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik.
- e. Kepemimpinan etis dan pendidikan perdamaian menjadi fondasi penting untuk membentuk masyarakat yang adil dan kohesif.
- f. Peran perempuan dan pemuda dalam kehidupan publik dan dialog antaragama harus diperkuat secara sistemik.
- g. Solidaritas terhadap kelompok rentan, termasuk minoritas agama, pengungsi, dan masyarakat adat, menjadi prioritas dalam kebijakan dan aksi nyata.
- h. Deklarasi Marrakesh (2016) ditegaskan kembali sebagai kerangka hidup untuk melindungi hak-hak minoritas agama dan mendorong kewarganegaraan inklusif.



B. Saran

- a. Hasil-hasil Sidang *Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* yang diselenggarakan di Roma, Italia pada 19–21 Juni 2025 perlu disampaikan kepada Komisi I, VIII, dan AKD terkait lainnya. Diharapkan hasil-hasil Sidang dapat menjadi bahan masukan ketika melakukan Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja atau saat pembahasan RUU terkait dengan hubungan dan dialog antaragama .
 - b. Hasil-hasil event parlemen *Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* yang diselenggarakan di Roma, Italia pada 19–21 Juni 2025 ini perlu didiseminasikan lebih lanjut dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Bappenas.
 - c. Pengiriman delegasi ke *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* ke depan dapat melakukan FGD dengan mengundang instansi terkait sesuai tema sidang. Hal ini bertujuan untuk memperkaya substansi materi.
 - d. DPR RI disarankan untuk mengadakan sesi khusus tentang dialog antaragama dengan melibatkan semua komunitas agama dan kepercayaan di Indonesia. Perlu juga dijajaki kemungkinan DPR RI menjadi tuan rumah *Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* ke depan.
 - e. Pengiriman delegasi ke forum-forum internasional yang membahas dialog antaragama lainnya perlu diintensifkan guna menjalin kerja sama global dan bertukar pengalaman, strategi, dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kerukunan umat beragama.
- 

IV. PENUTUP

A. Anggaran

Kegiatan perjalanan dinas luar negeri untuk menghadiri kunjungan kerja BKSAP ke *the Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* di Roma, Italia, 19-21 Juni 2025 ini. menggunakan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 001030.CF.5805.AEC.001.051.C.524211 untuk belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp. 925.022.775,00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

B. Ucapan Terima Kasih

Atas nama Delegasi BKSAP DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengikuti pelaksanaan event parlemen *Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* yang diselenggarakan di Parlemen Italia, Roma pada 19–21 Juni 2025. Semoga peran BKSAP DPR RI sebagai peserta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan diplomasi parlemen dan kegiatan-kegiatan IPU di masa yang akan datang.

C. Keterangan Lampiran

Laporan ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Bahan Masukan
2. Poin Intervensi
3. List of Speaker Interfaith
4. Invitation IFC Rome
5. [Foto dan Video Kegiatan](#)
6. Link Berita di Media Sosial :
 - [BKSAP Serukan Penguatan Kolaborasi Antar Agama](#)
 - [Masyarakat Beragama Harus Hidup Berdampingan Secara Damai](#)
 - [Dari Indonesia untuk Dunia: Toleransi Adalah Fondasi Persatuan](#)
 - [Peran penting parlemen dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas agama serta menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa, sebagai dasar terciptanya masyarakat yang damai](#)



D. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi BKSAP DPR RI pada event parlemen *Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue* yang diselenggarakan di Roma, Italia pada 19–21 Juni 2025. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 25 Juni 2025

Ketua Delegasi,

Irine Yusiana Roba Putri





LAMPIRAN

“SECOND PARLIAMENTARY CONFERENCE
ON INTERFAITH DIALOGUE”



Geneva/Rome, 15 November 2024

Dear Madam Speaker,
Dear Mr. Speaker,

It is our pleasure to invite you to the Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue *Strengthening trust and embracing hope for our common future*, which will take place from 19 to 21 June 2025 in Rome, Italy, coinciding with the Jubilee year announced by Pope Francis. The Conference is being organized by the Inter-Parliamentary Union (IPU) and the Italian Parliament, in cooperation with Religions for Peace.

The Rome Conference follows the highly successful Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue *Working together for our common future*, which took place in Marrakesh in 2023 and was organized by the IPU and the Parliament of the Kingdom of Morocco in cooperation with other partners. The first Conference concluded with the [Marrakesh Communiqué](#), in which parliamentarians acknowledged that interfaith dialogue that is grounded in support of fundamental rights and freedoms is an essential tool for promoting inclusivity and peaceful coexistence, upholding the rule of law and encouraging collective efforts to achieve a better society. Building on previous IPU statements, such as the [Manama Declaration](#) (2023) *Promoting peaceful coexistence and inclusive societies: Fighting intolerance*, the Marrakesh Communiqué identifies important areas of action for parliamentarians in order to build more peaceful and inclusive societies which honour religious and belief diversity, and uphold the equal and inalienable rights and dignity of all.

The Rome Conference will bring together parliamentarians and representatives of governments, religions, beliefs, faith-based and civil society organizations, the United Nations, international organizations and academia to engage in dialogue around good practices and challenges in their work to promote sustainable peace, human rights, democracy, good governance and inclusive societies, while exploring avenues for joint action.

Your participation in this Conference will contribute towards enabling an inclusive process which can help bring about positive change. We will be pleased to welcome the President of each Chamber of bicameral Parliaments together with a delegation of two members of parliament, and the President of unicameral Parliaments together with a delegation of three members of parliament. We would encourage you to strive for a gender-balanced delegation and to include a youth representative. If your Parliament has a committee for religious or cultural affairs, we recommend including the head of this committee in the delegation.

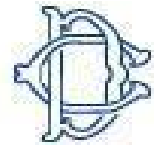
A draft programme and more information about the Conference will be shared with you in the coming months (see annex for more details on hotels and reservations). In the meantime, we would be grateful if you could mark this important event in your agenda and let us know if you will be able to attend. For any questions, please contact us at postbox@ipu.org.

Yours sincerely,

Ignazio La Russa
President of the
Senate

Tulia Ackson
IPU President

Lorenzo Fontana
President of the
Chamber of Deputies



Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Strengthening trust and embracing hope for our common future

19–21 June 2025, Rome

General Debate

***Parliamentarians in dialogue with religion and belief: Strengthening trust
and embracing hope for our common future***

Débat général

***Le dialogue parlementaire sur la religion et la conviction : renforcer
la confiance et susciter l'espoir pour bâtir notre avenir commun***

Plenary Hall of the Chamber of Deputies / *Salle plénière de la Chambre des députés*
20 June 2025, 09:00 – 12:30 and 14:00 – 17:00

Version 16.06.2025

Following introductory remarks, the General Debate will start with a high-level segment for Speakers of Parliament, prominent religious leaders, and heads of organizations.

National delegations may register a maximum of two MPs for the General Debate, sharing a total speaking time of 6 minutes (maximum 4 minutes if only one MP is speaking from the delegation).

Religious leaders, representatives of NGOs and faith-based organizations, and representatives of academia may speak for 3 minutes each.

Time permitting, additional speakers may be given the floor towards the end of the General Debate.

* * * * *

Après les remarques liminaires, le débat général débutera par un segment de haut niveau réservé aux présidents de parlement, aux hauts responsables religieux et aux chefs d'organisations.

Chaque délégation nationale peut inscrire jusqu'à deux parlementaires pour le débat général, lesquels disposeront d'un temps de parole total de six minutes (ou de quatre minutes si un seul parlementaire prend la parole).

Les responsables religieux, les représentants d'ONG et d'organisations confessionnelles ainsi que les représentants du monde universitaire disposeront chacun d'un temps de parole de trois minutes.

Si le temps le permet, d'autres personnes pourront être invitées à prendre la parole à la fin du débat général.

A. HIGH-LEVEL SEGMENT OF THE GENERAL DEBATE
VOLET DE HAUT NIVEAU DU DÉBAT GÉNÉRAL

No.	Name / Nom	Title / Titre	Country / Pays
1	Ahmed Bin Salman Almusalam (Mr./M.)	Speaker of the Council of Representatives <i>Président du Conseil des représentants</i>	Bahrain <i>Bahreïn</i>
2	Archbishop Angaelos (Mr./M.)	Archbishop of the Coptic Orthodox Church, UK <i>Archevêque de l'Église copte orthodoxe au Royaume-Uni</i>	
3	Mohammad Al Yammahi (Mr./M.)	President of the Arab Parliament <i>Président du Parlement arabe</i>	
4	Yahya Pallavicini (Mr./M.)	Chairman of the European Muslim Leaders' Majlis (EULEMA); Member of the European Council of Religious Leaders-Religions for Peace <i>Président du réseau European Muslim Leaders' Majlis (EULEMA)</i> <i>Membre du Conseil européen de responsables religieux-Religions for Peace</i>	
5	Denis Zvizdić (Mr./M.)	Speaker of the House of Representatives <i>Président de la Chambre des représentants</i>	Bosnia and Herzegovina <i>Bosnie-Herzégovine</i>
6	Dietrich Werner (Mr./M.)	President of Globethics <i>Président de Globethics</i>	
7	Austelino Tavares Correia (Mr./M.)	Speaker of the National Assembly <i>Président de l'Assemblée nationale</i>	Cabo Verde
8	Ahmad Abaddi (Mr./M.)	Secretary General of the Mohammadia League of Religious Scholars <i>Secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas</i> (video message / message vidéo)	
9	María Teresa Efua Asangono (Ms./Mme)	President of the Senate <i>Présidente du Sénat</i>	Equatorial Guinea <i>Guinée équatoriale</i>
10	Bhai Sahib Professor Mohinder Singh Alhuwalia (Mr./M.)	Chairman of the Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha; Co-President and Trustee of the Religions for Peace <i>Président de l'organisation Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha ;</i> <i>Co-Président et membre du Conseil d'administration de l'organisation Religions for Peace</i>	
11	Sagr Ghobash (Mr./M.)	Speaker of the Federal National Council <i>Président du Conseil national de la Fédération</i>	United Arab Emirates <i>Émirats arabes unis</i>
12	David Saperstein (Mr./M.)	Director Emeritus and Senior Advisor for Policy and Strategy of the Religious Action Center of Reform Judaism <i>Directeur émérite et Conseiller principal pour les politiques et les stratégies du Centre d'action religieuse du judaïsme réformé</i>	
13	Lindiwe Dlamini (Ms./Mme)	President of the Senate <i>Présidente du Sénat</i>	Eswatini
14	Ioan Vulpescu (Mr./M.)	President of the General Assembly of the Interparliamentary Assembly on Orthodoxy <i>Président de l'Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire sur l'orthodoxie</i>	
15	Mark Daly (Mr./M.)	Chairperson of the Senate <i>Président du Sénat</i>	Ireland <i>Irlande</i>
16	Ryokyu Endo (Mr./M.)	Chief Priest of the Wada Temple, Kyoto, Japan <i>Grand Prêtre du Temple Wada, Kyoto (Japon)</i>	
17	Hassan bin Abdulla Al-Ghanim (Mr./M.)	Speaker of the Shura Council <i>Président du Conseil de la choura</i>	Qatar

18	Elias Deis (Mr./M.)	Executive Director of the Holy Land Trust <i>Directeur exécutif de l'organisation Holy Land Trust</i>	
19	Amason Jeffah Kingi (Mr./M.)	Speaker of the Senate <i>Président du Sénat</i>	Kenya
20	Prashant Sharma (Mr./M.)	President and Co-Founder of the Dharma Alliance <i>Président et Co-fondateur de la Dharma Alliance</i>	
21	Manuel José Ossandón Irrarázabal (Mr./M.)	President of the Senate <i>Président du Sénat</i>	Chile <i>Chili</i>

B. OTHER SPEAKERS REGISTERED IN THE GENERAL DEBATE
AUTRES ORATEURS INSCRITS AU DÉBAT GÉNÉRAL

No.	Name / Nom	Title / Titre	Country / Pays
1	Fazil Mustafa (Mr./M.)	Member of the National Assembly <i>Membre de l'Assemblée nationale</i>	Azerbaijan <i>Azerbaïdjan</i>
2	Sharon Rosen (Ms./Mme)	Former Global Director of Religious Engagement of the Search for Common Ground <i>Ancienne Directrice mondiale de Religious Engagement of the Search for Common Ground</i> (video message / message vidéo)	
3	Khushwant Singh (Mr./M.)	Head of Secretariat of the International Partnership on Religion and Sustainable Development (PaRD) <i>Chef du Secrétariat du Partenariat international sur la religion et le développement durable (PaRD)</i>	
4	Aminatou Ngangoube (Ms./Mme)	Member of the Senate <i>Membre du Sénat</i>	Cameroon <i>Cameroun</i>
5	Gennaro Migliore (Mr./M.)	Director of the Advisory Board of the International Committee on Countering Extremist and Hate Speech (ICCEHS) <i>Directeur du Conseil consultatif du Comité international de lutte contre les discours extrémistes et haineux (ICCEHS)</i>	
6	Michael Cooper (Mr./M.)	Member of the House of Commons <i>Membre de la Chambre des communes</i>	Canada
7	Angelo Rojch (Mr./M.)	President of the High Committee Board of the Istituto delle Culture Religiose <i>Président du Conseil supérieur de l'Istituto delle Culture Religiose</i>	
8	Koffi Kra Paulin Kouassi (Mr./M.)	Member of the National Assembly <i>Membre de l'Assemblée nationale</i>	Côte d'Ivoire
9	Esben Lunde Larsen (Mr./M.)	Senior One Health Specialist of the Pandemic Fund, World Bank <i>Spécialiste principal de l'approche "Une seule santé" du Fonds de lutte contre les pandémies, Banque mondiale</i>	
10	Helle-Moonika Helme (Ms./Mme)	Member of the Riigikogu <i>Membre du Riigikogu</i>	Estonia <i>Estonie</i>
11	Saba Haddad (Ms./Mme)	Representative of the Baha'i International Community to the United Nations <i>Représentante de la Communauté internationale bahaïe auprès des Nations Unies</i>	
12	Mónika Bartos (Ms./Mme)	Member of the National Assembly <i>Membre de l'Assemblée nationale</i>	Hungary <i>Hongrie</i>
13	Farooq Aftab (Mr./M.)	Secretariat of Human Rights Committee UK; <i>Secrétariat du Comité des droits de l'homme du Royaume-Uni</i>	
14	Morteza Agha Tehrani (Mr./M.)	Member of the Islamic Parliament of Iran <i>Membre du Parlement islamique d'Iran</i>	Iran (Islamic Republic of) / Iran (République islamique d')
15	Deborah Bergamini (Ms./Mme)	Rapporteur on Political Affairs of the Parliamentary Assembly of the Mediterranean <i>Rapporteuse de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée pour les affaires politiques</i>	
16	Ahmed Touizi (Mr./M.)	Member of the House of Representatives <i>Membre de la Chambre des Représentants</i>	Morocco <i>Maroc</i>
17	Thiago Felipe Alves Pinto (Mr./M.)	Director of Studies in Religion and Theology, University of Oxford <i>Directeur des études en religion et théologie, Université d'Oxford</i>	
18	Pedro Comissario Afonso (Mr./M.)	Member of the Assembly of the Republic <i>Membre de l'Assemblée de la République</i>	Mozambique

19	Gaetan Roy (Mr./M.)	Permanent Representative to the United Nations in Geneva of the World Evangelical Alliance <i>Représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève de l'Alliance évangélique mondiale</i>	
20	Boban Karapejovski (Mr./M.)	Member of the Assembly of the Republic <i>Membre de l'Assemblée de la République</i>	North Macedonia <i>Macédoine du Nord</i>
21	Reuben Emmanuel (Mr./M.)	Advocacy Officer of Tearfund Nigeria <i>Chargé de plaidoyer à Tearfund Nigeria</i>	
22	Farooq Hamid Naek (Mr./M.)	Member of the Senate <i>Membre du Sénat</i>	Pakistan
23	Ivan Arjona Pelado (Mr./M.)	President of the UN Geneva NGO Committee on Freedom of Religion or Belief <i>Président du Comité des ONG de l'ONU à Genève pour la liberté de religion ou de conviction</i>	
24	Guillermo Rodriguez (Mr./M.)	Member of the Chamber of Deputies <i>Membre de la Chambre des députés</i>	Paraguay
25	Ewelina Ochab (Ms./Mme)	Senior Programme Lawyer of the International Bar Association's Human Rights Institute <i>Juriste de programme principale à l'Institut des droits de l'homme de l'Association internationale du barreau</i>	
26	Kazimierz Ujazdowski (Mr./M.)	Member of the Senate <i>Membre du Sénat</i>	Poland <i>Pologne</i>
27	Viktor Eichner (Mr./M.)	World Jewish Congress Representative to the Holy See <i>Représentant du Congrès juif mondial auprès du Saint-Siège</i>	
28	Rodrigo Goñi (Mr./M.)	Member of the House of Representatives <i>Membre de la Chambre des représentants</i>	Uruguay
29	Fareed Ahmad (Mr./M.)	National External Affairs Secretary of the Ahmadiyya Muslim Community <i>Secrétaire national aux affaires extérieures de la Communauté musulmane Ahmadiyya</i>	
30	Agustín Almodobar (Mr./M.)	Member of the Senate <i>Membre du Sénat</i>	Spain <i>Espagne</i>
31	Claudio Cajado Sampaio (Mr./M.)	Member of the Federal Senate <i>Membre du Sénat fédéral</i>	Brazil <i>Brésil</i>
32	Hatem El Hady (Mr./M.)	Baha'i International Community Representative to the Arab Region <i>Représentant de la Communauté internationale bahaïe pour la région arabe</i>	
33	Alex Sobel (Mr./M.)	Member of the House of Commons <i>Membre de la Chambre des communes</i>	United Kingdom <i>Royaume-Uni</i>
34	Hayder Al-Khoei (Mr./M.)	Ambassador of BPUR International <i>Ambassadeur de BPUR International</i>	
35	S. Phangnon Konyak (Ms./Mme)	Member of the Rajya Sabha <i>Membre du Rajya Sabha</i>	India <i>Inde</i>
36	Christos Dermentzopoulos (Mr./M.)	Member of the Hellenic Parliament <i>Membre du Parlement hellénique</i>	Greece <i>Grèce</i>
37	Yongying Yang (Ms./Mme)	Member of the National People's Congress <i>Membre de l'Assemblée populaire nationale</i>	China <i>Chine</i>
38	José Kalala Wa Kalala (Mr./M.)	Member of the Senate <i>Membre du Sénat</i>	Congo
39	David Agius (Mr./M.)	Member of the House of Representatives <i>Membre de la Chambre des représentants</i>	Malta <i>Malte</i>
40	Maddalena Muccioli (Ms./Mme)	Member of the Great and General Council <i>Membre du Conseil Grand et Général</i>	San Marino <i>Saint-Marin</i>
41	Lilja Rafney Magnúsdóttir (Ms./Mme)	Member of the Althingi <i>Membre de l'Althingi</i>	Iceland <i>Islande</i>

C. SECOND SPEAKERS FROM DELEGATIONS
SECONDS ORATEURS DES DÉLÉGATIONS

No.	Name / Nom	Title / Titre	Country / Pays
1	Azar Karimli (Mr./M.)	Member of the National Assembly <i>Membre de l'Assemblée nationale</i>	Azerbaijan <i>Azerbaïdjan</i>
2	Nikola Lazic (Mr./M.)	Member of the Serbian Delegation to the Parliamentary Assembly of the Mediterranean <i>Membre de la délégation serbe auprès de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée</i>	
3	Rahim Zare (Mr./M.)	Member of the Islamic Parliament of Iran <i>Membre du Parlement islamique d'Iran</i>	Iran (Islamic Republic of) / Iran (<i>République islamique d'</i>)
4	Pa Daly (Mr./M.)	Member of Dáil Éireann <i>Membre du Dáil Éireann</i>	Ireland <i>Irlande</i>
5	Manzila Uddin (Ms./Mme)	Member of the House of Lords <i>Membre de la Chambre des Lords</i>	United Kingdom <i>Royaume-Uni</i>